

DESKRIPSI HKI

Karya ini membahas perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pengaruh perubahan tersebut terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Perubahan terhadap undang undang KPK menjadi bagian penting dalam perkembangan pengaturan kelembagaan dan kewenangan KPK, khususnya setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pembahasan dalam karya ini dilakukan melalui studi yuridis dengan membandingkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan ketentuan setelah dilakukan perubahan. Analisis mencakup perubahan mengenai kelembagaan KPK, kedudukan pegawai, pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, serta kewenangan penghentian penyidikan. Perubahan tersebut dikaji untuk melihat bagaimana pengaturan baru memengaruhi ruang lingkup kewenangan dan pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karya ini juga membahas efektivitas perubahan regulasi tersebut dengan melihat hubungan antara perubahan norma hukum dan pelaksanaan fungsi KPK. Hasil kajian menunjukkan adanya sejumlah perubahan mendasar yang berpotensi memengaruhi independensi, kewenangan, serta ruang gerak KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Karya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan pengaturan KPK dan implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang

Undang-undang 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wahyuningrum, Kartika S., Hari S. Disemadi, dan Nyoman S. Putra Jaya, 2020, *“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,”* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2.

<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi#>